

Ketahanan dan Keragaman Pangan Masyarakat Pesisir di Provinsi Papua Barat, Indonesia

Food Security and Diversity of Coastal Communities in West Papua Province, Indonesia

Ramadhan Tri Admaja^{1,2}, Fitryanti Pakiding^{3*}, Isak Silamba³, Dariani Matualage⁴

¹ Alumni Jurusan Teknologi Hasil Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Papua,

² Balai Pengawasan Obat dan Makanan

³ Jurusan Teknologi Hasil Pertanian, Fakultas Teknologi, Universitas Papua

⁴ Jurusan Matematika dan Statistika, Fakultas Matematika dan Ilmu Alam, Universitas Papua

* Email korespondensi: f.pakiding@unipa.ac.id; fitryanti@yahoo.com

Abstract

Food security is a condition of fulfilling food at the country scale down to individuals, which is reflected in the availability of sufficient food, both in quantity and quality, safe, diverse, nutritious, equitable, and affordable. It does not conflict with the religion, beliefs, and culture of society to be able to live a healthy life, active and productive in a sustainable manner. One of the crucial groups of people who live in West Papua Province is the coastal communities of West Papua. This study aims to provide information on the status of food security and the diversity of families living in the coastal areas of West Papua Province. In particular, we conducted this research to obtain information on food security and diversity status in terms of food access and utilization pillars. Measuring household food security status using the U.S. Household Food Security Survey Module (US HFSSM) and measuring diversity in food consumption based on the household dietary diversity score (HDDS). The results showed that household food security in the coastal area of the bird's head was quite good; Cendrawasih Bay National Park was the most food-secure area at 77.16%, and the least food secure was the Sorong coast at 29.76%. The highest food diversity was in the Misool area, 77.47%, and the lowest was in Telma, 22.08%.

Key Words: Coastal communities, Food access, Food diversity, Food security, West Papua

Abstrak

Ketahanan pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Salah satu kelompok penting masyarakat yang bermukim di Provinsi Papua Barat adalah masyarakat pesisir Papua Barat. Penelitian ini bertujuan untuk menyediakan informasi status ketahanan dan keragaman pangan keluarga yang bermukim di wilayah pesisir Provinsi Papua Barat. Secara khusus penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan informasi, status ketahanan dan keragaman pangan ditinjau dari pilar akses dan pemanfaatan pangan. Pengukuran status

ketahanan pangan rumah tangga menggunakan instrumen *U.S. Household Food Security Survey Module* (US HFSSM) dan pengukuran keragaman konsumsi pangan berdasarkan *household dietary diversity score* (HDDS). Hasil penelitian menunjukkan ketahanan pangan rumah tangga wilayah pesisir kepala burung cukup baik, Taman Nasional Teluk Cendrawasih merupakan wilayah paling tahan pangan mencapai 77,16% dan paling tidak tahan pangan pesisir Sorong 29,76%. Keanekaragaman pangan tertinggi berada pada daerah Misool 77,47% dan terendah Telma 22,08%.

Kata Kunci: Masyarakat pesisir, Akses pangan, Keragaman Pangan, Ketahanan Pangan, Papua Barat

PENDAHULUAN

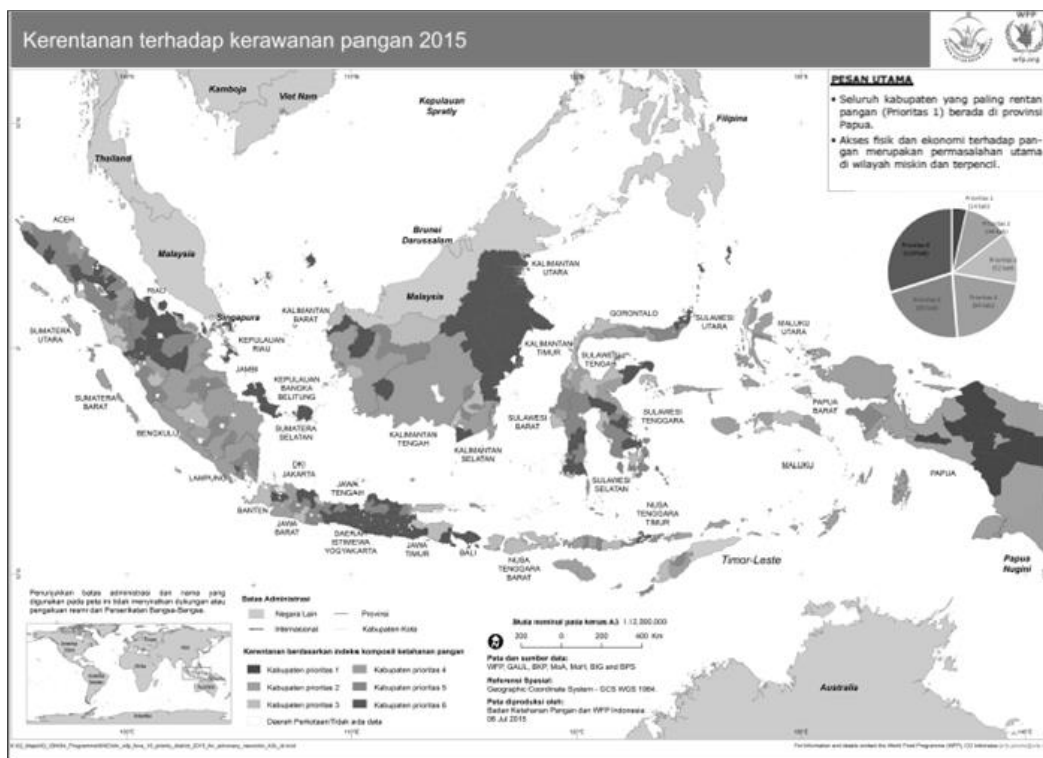
Ketahanan pangan didefinisikan dalam Undang-undang No 18/2012 sebagai kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Negara, berdasarkan undang-undang ini dan juga Undang-undang Dasar 1945, menjamin ketahanan pangan setiap warga negara Indonesia. Oleh para ahli di bidang studi ketahanan pangan, definisi ini mencakup 4 pilar ketahanan pangan: ketersediaan, keterjangkauan, ketermanfaatan, dan kestabilan pangan. ketahanan pangan masyarakat menjadi prioritas program pembangunan baik tingkat nasional maupun tingkat kabupaten/kota.

Kondisi ketahanan pangan masyarakat di Indonesia dilaporkan setiap 5 tahun sekali dalam peta kerentanan dan kerawanan pangan. Peta kerentanan dan kerawanan pangan tahun 2015, disusun menggunakan 13 indikator, mengelompokkan kondisi ketahanan dan kerentanan pangan di setiap kabupaten di Indonesia (Dewan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian, and World Food Programme, 2016). 398 kabupaten yang disurvei kemudian dikelompokkan menjadi enam kelompok prioritas yang mencerminkan situasi ketahanan pangan dan gizinya, yaitu dari yang paling rentan terhadap kerawanan pangan dan gizi (Prioritas 1) sampai dengan kelompok yang relatif tahan pangan dan gizi (Prioritas 6).

Berdasarkan indikator yang digunakan dalam Peta Kerentanan terhadap Kerawanan Pangan 2015, hampir seluruh kabupaten di Provinsi Papua Barat tergolong dalam wilayah Prioritas 2,

dan hanya Kabupaten Bintuni yang tergolong dalam Prioritas 5 (Gambar 1). Kondisi ini tentu sangat memprihatinkan, terutama karena Provinsi Papua Barat memiliki sumberdaya alam yang luar biasa, baik sumberdaya alam di wilayah daratan (Kartikasari dkk., 2012) maupun lautan (Pakiding dkk., 2020). Sumberdaya alam yang dimiliki Provinsi Papua Barat, seharusnya, bukan saja merupakan sumber pendapatan bagi wilayah ini,

tetapi juga merupakan sumber pangan bagi warganya. Sayangnya, sumberdaya alam sebagai penyedia bahan pangan hanyalah merupakan salah satu pilar dalam ketahanan pangan (Maxwell dan Frankenberger, 1992), sehingga ketersediaan bahan baku hanya merupakan syarat perlu tetapi belum cukup untuk menjamin ketahanan pangan suatu daerah.



Sumber: Dewan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian, and World Food Programme (2016)

Gambar 1. Kondisi Kerentanan terhadap Kerawanan Pangan Indonesia tahun 2015

Definisi ketahanan pangan seperti yang termuat dalam Undang-undang No 18/2012 secara konsep mencakup 3 pilar ketahanan pangan: ketersediaan, akses, dan pemanfaatan. Untuk mencapai ketahanan pangan, ketiga pilar ini harus dipenuhi secara hirarki: ketersediaan pangan perlu tetapi tidak cukup untuk menjamin kemampuan seseorang untuk mengakses pangan, dan kemampuan seseorang untuk mengakses pangan yang tersedia baginya perlu tetapi tidak cukup untuk menjamin bahwa makanan yang sudah tersedianya dimanfaatkan dengan baik oleh individu atau keluarga (Barrett, 2010). Oleh karena itu, pengukuran ketahanan pangan individu maupun keluarga menjadi hal yang kompleks tetapi juga dinamis karena konsep ‘setiap saat’ yang ada pada definisi ketahanan pangan (Peng dan Berry, 2019). Dengan demikian, disadari bahwa tidak ada satu konsep pengukuran yang sempurna untuk mengukur kondisi ketahanan pangan masyarakat (Carletto dkk., 2013), dan penelitian pada skala mikro (rumah tangga dan individu) selalu disarankan untuk memahami kondisi ketahanan pangan yang lebih baik (Jones dkk., 2013).

Salah satu kelompok penting masyarakat yang bermukim di Provinsi Papua Barat adalah masyarakat pesisir Papua Barat. Wilayah pesisir Papua Barat mencakup lebih dari 2.500 pulau, tersebar sepanjang 225.000 km² (atau 22,5 juta hektar), dan wilayah lautnya merupakan rumah bagi 75% karang dunia sehingga menjadi habitat bagi berbagai jenis ikan dan mamalia laut lainnya (Wallace dkk., 2011; Mangubhai dkk., 2012). Kekayaan sumber daya alam ini menyokong penghidupan dan ketahanan pangan kira-kira 273.897 orang yang hidup di kampung-kampung Pesisir (Badan Pusat Statistik, 2017). Namun, sampai saat ini informasi mengenai kondisi ketahanan pangan masyarakat di pesisir Provinsi Papua Barat masih sangat terbatas.

Peta kerawanan dan kerentanan pangan Indonesia, menggunakan 13 indikator yang mencakup tiga pilar ketahanan pangan dan juga indikator mengenai kerentan pangan (Dewan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian dan World Food Programme, 2016). Indikator ketersediaan pangan meliputi ketersediaan pangan di suatu wilayah yang diperoleh dari produksi sendiri maupun pembelian dari wilayah lain. Sedangkan indikator akses terhadap pangan

umumnya berkaitan dengan tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat dan infrastruktur yang menghubungkan masyarakat dan pasar terdekat. Indikator pemanfaatan umumnya terdiri dari angka tingkat buta huruf perempuan, angka harapan hidup, akses terhadap air bersih, fasilitas kesehatan, dan juga angka stunting. Informasi-informasi umumnya tersedia pada tingkat regional (minimum pada tingkat distrik) dan jarang sekali yang tersedia pada tingkat yang lebih mikro (seperti rumah tangga dan individu). Padahal informasi pada skala mikro membantu intervensi kebijakan yang lebih tepat sasaran (Burchi dan De Muro, 2016). Informasi status ketahanan pangan pada Peta Kerawanan dan Kerentanan Pangan Indonesia merupakan status ketahanan pangan pada tingkat kabupaten, termasuk 13 kabupaten yang ada di Provinsi Papua Barat. Disadari bahwa rangkuman status ketahanan pangan yang tersedia pada peta tersebut, tidak mewakili ketahanan pangan setiap keluarga yang ada di wilayah tersebut. Akses yang dimiliki keluarga terhadap bahan pangan yang cukup dan bernutrisi juga

merupakan faktor yang krusial untuk mengurangi kerentanan pangan. Upaya untuk menjamin ketahanan pangan umumnya terkait dengan faktor-faktor sosial ekonomi dan level ketersediaan informasi mengenai pola makan yang sehat dan seimbang. Faktor sosial demografi juga bergantung pada jumlah pangan yang dikonsumsi seperti buah-buahan, sayuran, dan protein yang juga menentukan kondisi kesehatan seseorang. Efek negatif dari pola makan yang tidak bergizi sangat mempengaruhi kondisi kesehatan anak balita dan orang dewasa di atas 60 tahun. Pola makan yang tidak bergizi mempengaruhi pertumbuhan anak dan kualitas hidup orang dewasa.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menyediakan informasi status ketahanan dan keragaman pangan keluarga-keluarga yang bermukim di wilayah pesisir Provinsi Papua Barat. Secara khusus, status ketahanan dan keragaman pangan tersebut ditinjau dari pilar akses dan pemanfaatan pangan. Informasi yang dihasilkan melalui penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi pengambil kebijakan,

terutama untuk menentukan sasaran program-program peningkatan ketahanan pangan bagi masyarakat yang hidup di wilayah pesisir Provinsi Papua Barat.

METODE

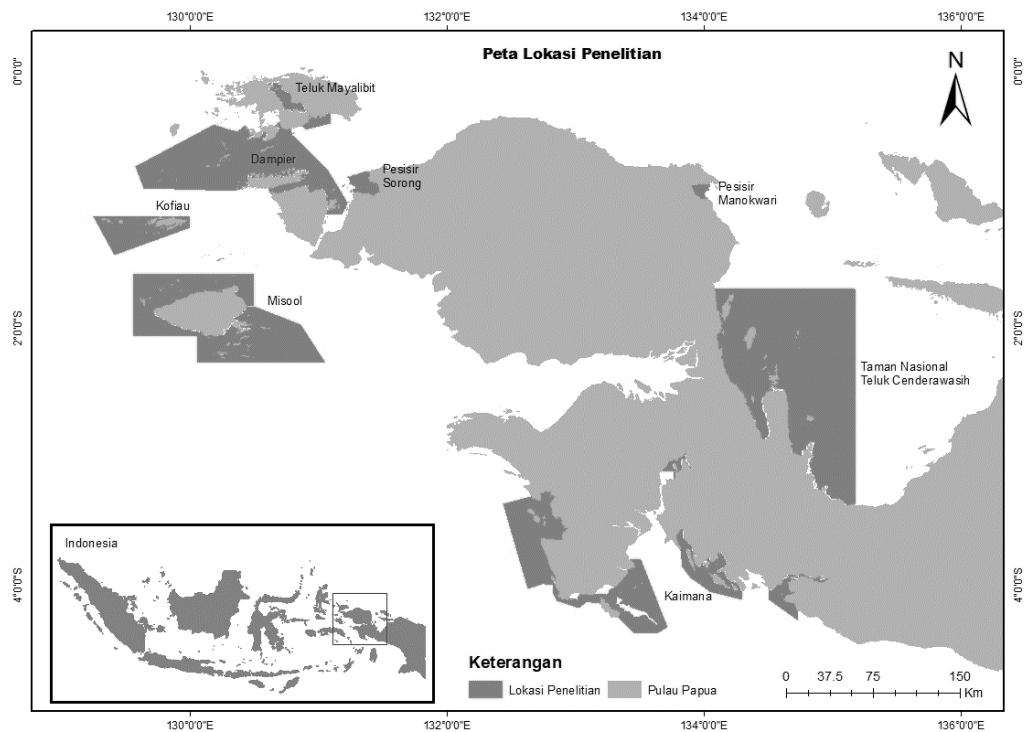
Pengumpulan data untuk keperluan menjawab tujuan penelitian ini dilakukan dengan metode survei lapang dengan responden pada tingkat rumah tangga. Bagian ini terdiri dari penjelasan mengenai instrument/bahan yang digunakan untuk pengumpulan data, lokasi dan waktu penelitian, populasi dan sampel penelitian, serta prosedur penelitian untuk penentuan status ketahanan pangan rumah tangga dan status keanekaragaman pangan rumah tangga.

Instrumen Penelitian

Pengumpulan data untuk penelitian ini dilakukan dengan menggunakan instrument penelitian berupa kuisioner dengan pertanyaan-pertanyaan tertutup yang disusun secara terstruktur.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini mencakup masyarakat yang hidup yaitu wilayah pesisir kepala burung papua. Daerah tersebut meliputi dataran rendah di Teluk Wondama ke arah Barat Laut menyusuri "leher" Semenanjung Cendrawasih hingga Manokwari, selanjutnya menuju Barat ke arah Sorong, dan memutar kembali ke arah Timur hingga Teluk Bintuni dan Semenanjung Bomberai (Fakfak dan Kumawa) (Gambar 2). Waktu pengumpulan data dimulai dari tahun 2013-tahun 2015.



Gambar 2. Lokasi Penelitian

Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini adalah masyarakat yang bermukim di 543 kampung/desa yang berada di pesisir dengan perkiraan jumlah kepala keluarga (KK) yaitu sebanyak 68.475 KK (Badan Pusat Statistik, 2017). Terbatasnya biaya dan lokasi survei yang sulit dijangkau maka penentuan kampung menggunakan metode *accidental sampling* (Sugiyono, 2016). Oleh karena itu, jumlah sampel kampung adalah 119 kampung dengan jumlah responden sebesar 2,549 kepala

keluarga. Identifikasi jumlah rumah tangga dalam setiap kampung yang diambil menjadi responden menggunakan perhitungan "*power analysis*" (Glew dkk., 2012). Secara matematis penentuan jumlah sampel minimum dengan analisis ini yaitu:

$$n = \frac{P(1-P)}{\frac{\alpha^2}{2} + \left(\frac{P(1-P)}{N}\right)}$$

dengan n (ukuran sampel minimum), N (ukuran populasi), P (estimasi keragaman populasi, nilai P paling konservatif sebesar 0,5), α (tingkat

ketepatan yang diharapkan, nilai α yang digunakan berkisar antara 5%), z (skor- z yang berkaitan dengan tingkat kepercayaan, nilai $z=1,96$ ekuivalen dengan tingkat kepercayaan 95%).

Tabel 1. Jumlah Kampung dan Responden di Delapan Wilayah Penelitian

Nama Wilayah	Jumlah Kampung	Jumlah Responden
Kofiau	8	264
Misool	19	388
Kaimana	17	497
Dampier	24	523
Teluk Mayalibit	14	309
Taman Nasional Teluk Cenderawasih	32	394
Pesisir Manokwari	3	90
Pesisir Sorong	2	84
Total	119	2549

Status Ketahanan Pangan Rumah Tangga

Penelitian ini menggunakan indikator yang didasarkan pada pengalaman responden dengan menggunakan instrumen U.S. Household Food Security Survey Module (Bickel dkk., 2000) untuk menentukan status ketahanan pangan rumah tangga. Instrumen ini telah direview oleh US National Research Council (2006) dan ditemui sebagai instrument yang memiliki konstruksi yang kuat, dapat diandalkan dengan tingkat akurasi yang didemonstrasikan dengan asosiasinya terhadap indikator pengukuran lainnya. Instrumen ini juga telah divalidasi di tiga

negara di luar Amerika Serikat. Secara khusus yang digunakan adalah versi yang diperpendek dengan 6 item skala ketahanan pangan rumah tangga yang ditanyakan melalui 6 pertanyaan yaitu: 1) kecukupan cadangan/persediaan makanan untuk mendapatkan makanan yang lebih; 2) memperoleh makanan yang seimbang (makanan yang terdiri dari jenis bahan makanan); 3) tidak makan karena tidak cukup makanan; 4) frekuensi terjadinya tidak makan karena tidak cukup makanan; 5) makan kurang dari yang seharusnya karena tidak ada cukup makanan; dan 6) merasa lapar dan tidak makan karena tidak ada

cukup makanan. Ke-enam item ini kemudian digunakan untuk menggambarkan apakah rumah tangga mempunyai makanan atau uang yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan yang didasarkan pada sikap dan respon subjektif pada kondisi tersebut (Bickel dkk., 2000; Leroy dkk., 2015).

Keluarga dikategorikan dalam tiga kelompok status ketahanan pangan: 1) Tidak tahan pangan dengan kelaparan; 2) Tidak tahan pangan tanpa kelaparan; 3) Tahan pangan berdasarkan respon yang diberikan untuk ke-enam pertanyaan di atas. Respon responden yang bersifat kualitatif diubah

terlebih dahulu dirubah menjadi kuantitatif dengan memberi kode “1” untuk respon positif terhadap pertanyaan yang diberikan dan sebaliknya kode “0” untuk respon negatif terhadap pertanyaan yang diberikan. Jumlah dari semua jawaban yang memberi respon positif terhadap pertanyaan kemudian diubah menjadi skor kontinyu dengan menggunakan skala standar skor metrik 1-10. Penggolongan status ketahanan pangan keluarga menggunakan penghitungan skala ketahanan pangan rumah tangga (Bickel dkk., 2000) pada Tabel 2.

Tabel 2. Penghitungan Skala Ketahanan Pangan Rumah Tangga

Jumlah respon positif responden	skala standar skor metrik 1-10	Status Ketahanan Pangan Keluarga
0	0	Tahan Pangan
1	2.04	
2	2.99	Tidak Tahan Pangan Tanpa Kelaparan
3	3.77	
4	4.50	
5	5.38	Tidak Tahan Pangan dengan Kelaparan
6	6.06	

(Sumber: Bickel dkk., 2000: 62)

Status Keanekaragaman Pangan Rumah

Tangga

Keanekaragaman konsumsi pangan dihitung menggunakan *household dietary diversity score*

(HDDS) (FAO, 2010), yaitu pengujian dengan mendeskripsikan apa yang dimakan dan diminum kemarin dari pagi hingga malam baik di dalam maupun luar rumah (metode *recall* konsumsi

pangan,). Semua deskripsi bahan pangan dan minuman yang disebutkan oleh responden dicatat pada kuisioner yang telah disiapkan.

Deskripsi pangan yang disampaikan oleh responden kemudian dikuantitatifkan dengan pemberian skor. Pemberian skor dilakukan dengan memberikan skor 1 jika rumah tangga mengkonsumsi dan skor 0 jika tidak mengkonsumsi salah satu jenis pangan yang terdapat dalam kelompok pangan yang sudah ditetapkan oleh FAO (FAO, 2010). Keragaman konsumsi pangan berdasarkan HDDS dikelompokkan ke dalam tiga kategori yaitu rendah jika konsumsi ≤ 3 jenis bahan pangan, sedang jika konsumsi 4-5 jenis bahan pangan, dan tinggi jika konsumsi ≥ 6 jenis bahan pangan (Swindale dan Bilinsky, 2006).

Analisis Data

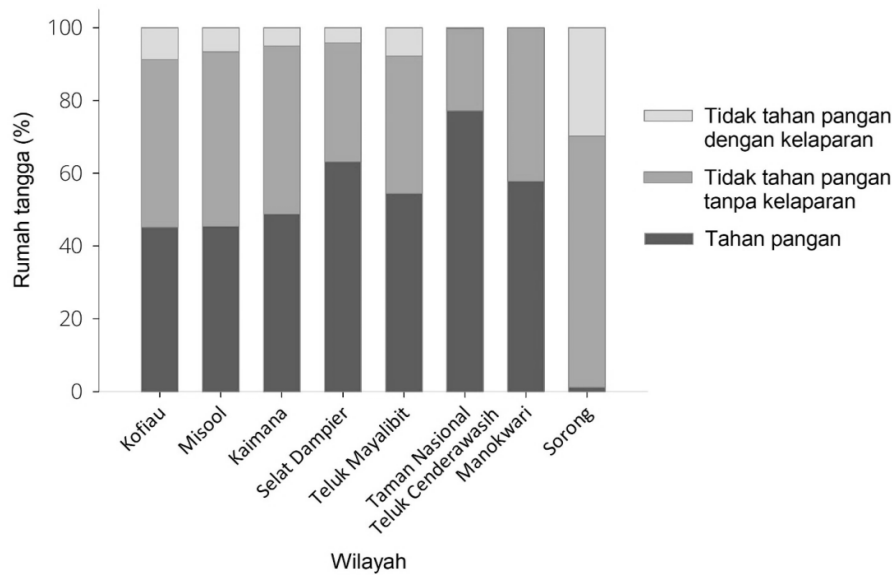
Metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif yaitu dengan menghitung

persentase rumah tangga untuk masing-masing kategori di setiap indikator.

HASIL DAN PEMBAHASAN:

Status Ketahanan Pangan Keluarga

Hasil pengamatan terhadap status ketahanan pangan keluarga bervariasi di wilayah pesisir Provinsi Papua Barat (Gambar 3). Keluarga dengan kategori tidak tahan pangan dengan kelaparan yang tertinggi ditemui di daerah pesisir Sorong (29,76%) dan yang terendah di pesisir Manokwari (0%). Sedangkan, keluarga dengan kategori tidak tahan pangan namun tidak kelaparan yang tertinggi ditemui di pesisir Sorong juga (69,05%) dan yang terendah di Taman Nasional Teluk Cendrawasih (22,60%). Keluarga dengan kategori tahan pangan yang tertinggi di temui di daerah Taman Nasional Teluk Cendrawasih (77,16%) dan yang terendah di pesisir Sorong (1,19%).



Gambar 3. Status Ketahanan Pangan Rumah Tangga di Pesisir Papua Barat

Mengukur status ketahanan pangan suatu keluarga tidak mudah (Webb dkk., 2006), karena dimensi ketahanan pangan sangat kompleks. Namun, perkembangan penelitian di bidang ketahanan pangan memungkinkan pengukuran tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai faktor (Swindale dan Bilinsky, 2006). Secara umum, ketahanan pangan suatu masyarakat atau keluarga ditentukan oleh paling tidak tiga faktor penting: ketersediaan bahan pangan pada tingkat regional sampai lokal, kemudian faktor akses rumah tangga ke bahan pangan yang tersedia baginya, dan yang ketiga

kemampuan rumah tangga atau individu untuk memanfaatkan bahan makanan yang sudah diakses tersebut. Oleh karena itu, ketiga faktor ini diduga menjadi faktor penyebab mengapa status ketahanan pangan di wilayah Taman Pesisir Teluk Cenderawasih relatif lebih baik dibandingkan dengan wilayah pesisir lainnya. Namun, penelitian ini tidak secara khusus mengkaji faktor apa yang secara spesifik mempengaruhi status ketahanan pangan keluarga yang berbeda di antara lokasi yang menjadi fokus penelitian ini. Oleh karena itu diperlukan penelitian lanjutan agar informasi mengenai

faktor-faktor yang mempengaruhi status ketahanan pangan diketahui. Dengan demikian, rekomendasi kebijakan yang dapat diambil untuk mengatasi permasalahan tertentu menjadi lebih tepat sasaran.

Ketersediaan pangan bergantung kepada produksi lokal dan juga impor bahan pangan dari luar daerah. Sebagian besar masyarakat di wilayah pesisir Papua Barat menggantungkan sumber proteinnya baik dari produksi lokal maupun impor dari luar daerah. Sedangkan sumber karbohidrat bergantung pada produksi lokal maupun impor beras dari luar wilayah. Ketersediaan sumber pangan yang diimpor sangat bergantung pada infrastruktur transportasi untuk menyuplai bahan pangan ke berbagai pemukiman di wilayah ini. Penelitian ini tidak secara khusus melihat ketersediaan pangan di wilayah ini dan mengasumsikan bahwa ketersediaan bahan pangan cukup bagi keluarga-keluarga di wilayah studi.

Penelitian ini menekankan status ketahanan pangan berdasarkan kemampuan akses bahan pangan oleh keluarga. Kemampuan akses terhadap bahan pangan umumnya dipengaruhi oleh kemampuan suatu keluarga secara ekonomi

untuk membeli dan menyediakan bahan pangan untuk dikonsumsi oleh setiap anggota keluarga. Hasil penelitian ini mencatat bahwa terdapat keragaman status ketahanan pangan di setiap lokasi penelitian. Keragaman status ketahanan pangan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Pertanyaan selanjutnya dari penelitian ini adalah apakah keragaman ini murni ditentukan oleh perbedaan tingkat kesejahteraan keluarga? Atau apakah ada faktor-faktor lain yang turut menentukan kondisi ketahanan pangan di tingkat keluarga ini?

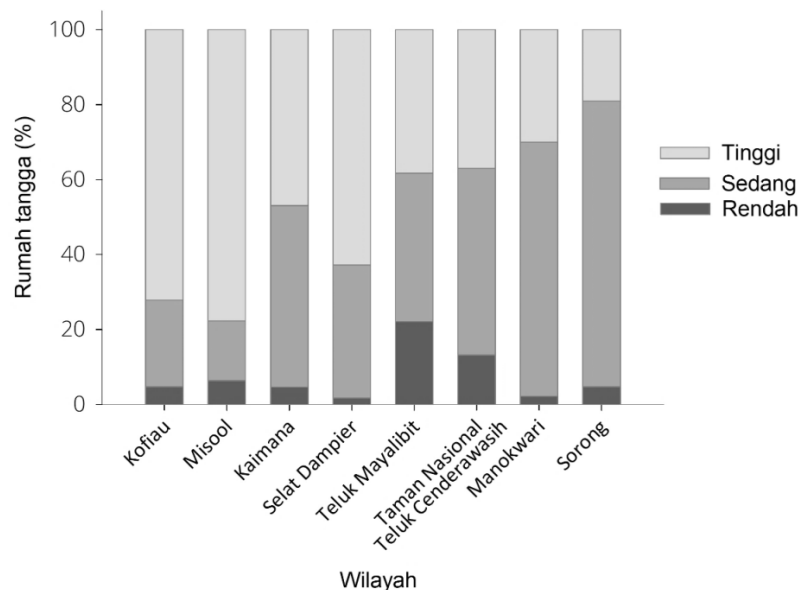
Indikator yang digunakan untuk menentukan status ketahanan pangan pada tingkat keluarga dalam penelitian ini berbeda dengan indikator yang digunakan untuk penentuan status ketahanan pangan daerah yang digunakan dalam peta kerawanan pangan tahun 2015. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam melakukan perbandingan informasi dari kedua sumber ini. Namun, kenyataan bahwa ada sekitar 5–75% di setiap lokasi yang tergolong dalam status “tahan pangan” menunjukkan bahwa sejumlah keluarga tersebut sebenarnya sudah keluar dari masalah kerentanan pangan. Detail informasi yang demikian memungkinkan para pelaksana program

dan pengambil kebijakan untuk menentukan sasaran program peningkatan ketahanan pangan yang lebih baik.

Status Keragaman Pangan Keluarga

Hasil pengamatan terhadap status keragaman pangan keluarga juga menunjukkan keragaman di delapan wilayah penelitian (Gambar 4). Misool memiliki kategori keanekaragaman (pemanfaatan) pangan tertinggi yang mencapai 77,47% dan daerah

terendah Sorong 19,05%. Untuk kategori sedang yang tertinggi daerah Sorong dengan capaian 76,19% dan yang terendah Misool 15,93%. Untuk kategori rendah yang tertinggi daerah Teluk Mayalibit mencapai 22,08% dan yang terendah Dampier 1,77%. Dengan demikian dapat diketahui Misool sebagai daerah dengan keanekaragaman pangan tertinggi dengan capaian 77,47% dan Telma sebagai daerah yang terendah dengan capaian 22,08%.



Gambar 4. Tingkat Keanekaragaman Pangan di Wilayah Pesisir Papua Barat

Pola konsumsi pangan adalah susunan jenis dan jumlah pangan yang dikonsumsi seseorang atau kelompok orang pada waktu tertentu (Madanijah 2004). Itu artinya dengan mengetahui jenis pangan yang dikonsumsi dapat dinilai pola konsumsi pangannya. Setiap daerah mempunyai pola konsumsi pangan yang berbeda, akan tetapi menu yang tersedia biasanya kurang memenuhi standar gizi yang dibutuhkan, sehingga perlu ditingkatkan kualitasnya dengan tidak merubah karakteristiknya, agar tetap dapat diterima oleh masyarakat setempat (Badan Bimas Ketahanan Pangan, 2002).

Status keragaman pangan keluarga di wilayah pesisir Provinsi Papua Barat bervariasi diantara wilayah yang menjadi objek survei. Keragaman status pangan tersebut dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti akses terhadap pasar, tingkat kesejahteraan ekonomi rumah tangga, tingkat pendidikan ibu, dan lain-lain. Faktor yang mempengaruhi keragaman pangan keluarga di suatu wilayah disamping dipengaruhi oleh faktor sosial yang saling berinteraksi dan juga bersifat sangat dinamis. Dalam tulisan ini kami hanya menjabarkan faktor akses ke bahan pangan, pendapatan, dan

tingkat pendidikan Ibu. Ketiga faktor ini kami duga menjadi faktor yang berpengaruh terhadap hasil yang didapatkan dalam penelitian ini.

Hardinsyah (2007) menyatakan bahwa salah satu faktor pendukung tingginya keragaman konsumsi pangan di suatu wilayah adalah akses fisik yang mudah terhadap beberapa kelompok pangan, seperti sereal dan sayuran. Jarak yang dekat ke pasar sehingga pemenuhan dalam kebutuhan pangan lebih mudah dan cepat sehingga jelas akan berpengaruh terhadap keanekaragaman pangannya. Data ini terutama untuk wilayah dengan akses terhadap pangan yang baik seperti pesisir Manokwari dan pesisir Sorong. Akan tetapi hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kedekatan jarak ke pasar tidak selalu berkorelasi positif terhadap tingkat keragaman pangan sebuah keluarga/individu. Sebagai contoh, masyarakat yang hidup di wilayah pesisir Sorong memiliki jarak yang relatif dekat dengan pasar akan tetapi jumlah keluarga yang tergolong dalam kategori memiliki keanekaragaman pangan yang tinggi lebih rendah dibandingkan dengan masyarakat yang hidup di Misool yang jarak ke pasarnya (umumnya mereka menyebutkan pasar di Kota

Sorong sebagai tempat berbelanja keperluan mereka). Hal ini diduga disebabkan oleh sedikitnya waktu untuk mempersiapkan makanan yang lebih beragam, ketidakpedulian akan kualitas bahan pangan yang dimakan, atau pun karena kesulitan ekonomi yang menyebabkan ketidakmampuan untuk membeli makanan yang beragam. Berbeda dengan daerah dengan akses ke pasar yang kurang baik seperti di Misool dan Kofiau, untuk penyediaan makanan bagi keluarga mereka akan menanam, beternak maupun kegiatan lainnya. Sehingga jenis pangan keluarga-keluarga tersebut lebih beragam. Walaupun masyarakat yang menggantungkan pada sumber produksi pangan sendiri pun rentan akan suplai pangan yang berkurang akibat kegagalan panen dan kemungkinan keterbatasan sarana prasarana seperti bibit tanaman yang beragam yang memungkinkan suplai beragam bahan pangan. Oleh karena itu, penelitian mengenai tingkat status keanekaragaman pangan pada keluarga pada waktu yang berbeda perlu dilakukan sehingga informasi mengenai apakah status

keanekaragaman pangan yang tinggi hanya bersifat musiman, atau kah berlangsung sepanjang tahun dapat diketahui.

Selanjutnya tingkatan aset atau pendapatan rumah tangga diduga juga berpengaruh terhadap keanekaragaman pangan suatu rumah tangga. Semakin tinggi pendapatan rumah tangga maka akan semakin tinggi pula pendapatan yang dialokasikan untuk pangan (biaya pangan) (Goungetas dkk, 1993; Raunika dan Chung-liang Huang 1987). Pandangan umum mengenai hubungan antara pendapatan dan keragaman konsumsi pangan berasal dari bukti empiris umum bahwa ada perbedaan pola konsumsi pangan pada kelompok masyarakat menengah ke atas dan menengah ke bawah. Umumnya pola konsumsi pangan kelompok menengah ke bawah lebih sederhana dimana mereka lebih mengutamakan mengonsumsi sumber kalori yang murah (bahan pangan pokok), sedangkan pada kelompok menengah ke atas pola konsumsi pangannya lebih beragam dengan lebih banyak mengonsumsi pangan sumber protein dan

vitamin (Bouis 1990; Raunika dan Huang, 1987; Shah, 1983).

Secara umum di negara berkembang, ibu memainkan peranan penting dalam memilih dan mempersiapkan pangan untuk dikonsumsi anggota keluarganya. Walaupun sering kali para ibu bekerja di luar rumah, mereka tetap mempunyai andil besar dalam kegiatan pemilihan dan penyiapan makanan (Huffman 1987; Iwao 1993). Wanita terpelajar cenderung untuk tertarik terhadap informasi gizi dan banyak di antara mereka yang memperoleh informasi tersebut dari media cetak, khususnya majalah dan koran (Hickman dkk., 1993). Sebuah penelitian yang dilakukan di Indonesia menunjukkan bahwa ibu dengan tingkat pendidikan dan penghasilan lebih tinggi mendapat paparan dari media massa lebih tinggi juga (National Board for Family Planning (BKKBN) and Community System Foundation 1986). Oleh karena itu, pendidikan ibu rumah tangga diduga menjadi variabel penting dalam penentuan jenis pangan yang dikonsumsi. Walaupun tidak menjamin seorang ibu dengan pendidikan tinggi akan memperhatikan pola konsumsi pangan, ada juga yang tidak peduli dan cenderung tidak peduli, hanya memperhatikan

jumlah maupun ada atau tidaknya makanan di rumah. Namun, penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh tingkat pendidikan ibu rumah tangga terhadap tingkat keragaman pangan keluarga menjadi penting untuk dilakukan.

KESIMPULAN

Kondisi ketahanan pangan wilayah pesisir kepala burung rata-rata tahan pangan dan tidak tahan pangan namun tidak kelaparan, untuk kategori tidak tahan pangan dan kelaparan yang tertinggi pesisir Sorong 29,76% dan yang terendah pesisir Manokwari 0%. Kategori tidak tahan pangan namun tidak kelaparan yang tertinggi pesisir Sorong 69,05% dan yang terendah Taman Nasional Teluk Cendrawasih 22,60%. Untuk kategori tahan pangan yang tertinggi Taman Nasional Teluk Cendrawasih 77,16% dan terendah pesisir Sorong 1,19% pesisir Sorong 29,76% dan terendah pesisir Manokwari 0%.

Tingkat keanekaragaman pangan sudah cukup baik di wilayah kepala burung dengan kategori tinggi yang tertinggi Misool 77,47% dan terendah pesisir Sorong 19,05%. Untuk kategori sedang yang tertinggi pesisir Sorong 76,19% dan terendah Misool 15,93%. Untuk kategori rendah

wilayah tertinggi Teluk Mayalibit 22,08% dan terendah Dampier 1,77%.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penelitian ini didanai oleh program bantuan penelitian tugas akhir “TETHA HITIPEUW GRANT” yang dikelola oleh Divisi Pembangunan Berkelanjutan, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UNIPA. Sebagian besar data yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui kegiatan monitoring sosial di Kawasan Konservasi Perairan di Bentang Laut Kepala Burung yang didukung pendanaannya oleh Conservation International dan World Wildlife and Fund US.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Bimas Ketahanan Pangan, Departemen Pertanian RI. (2002). “Kebijakan Umum Dan Program Pemantapan Ketahanan Pangan.” Jakarta: BBKP Departemen Pertanian RI.
- Badan Pusat Statistik. (2017). *Indonesian Population Census 2016*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Barrett, C.B. (2010). “Measuring Food Insecurity.” *Science* 327 (5967): 825–28. <https://doi.org/10.1126/science.1182768>.
- Bickel, G., M. Nord, C. Price, W. Hamilton, & J. Cook. (2000). *Guide to Measuring Household Food Security, Revised 2000*. Alexandria VA: U.S. Department of Agriculture, Food and Nutrition Service.
- Bouis, H. E. (1990). “Evaluating Demand for Calories for Urban and Rural Populations in the Philippines: Implications for Nutrition Policy Under Economic Recovery.” *World Development* 18 (2): 281–99. [https://doi.org/10.1016/0305-750X\(90\)90053-Z](https://doi.org/10.1016/0305-750X(90)90053-Z).
- Burchi, F., & Pasquale De Muro. (2016). “From Food Availability to Nutritional Capabilities: Advancing Food Security Analysis.” *Food Policy* 60 (April): 10–19. <https://doi.org/10.1016/j.foodpol.2015.03.008>.
- Carletto, C, Alberto, Z., & R. Banerjee. (2013). “Towards Better Measurement of Household Food Security: Harmonizing Indicators and the Role of Household Surveys.” *Global Food Security* 2 (1): 30–40. <https://doi.org/10.1016/j.gfs.2012.11.006>.
- Dewan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian, and World Food Programme. 2016. “Peta Ketahanan Dan Kerentanan Pangan Indonesia 2015.” Jakarta, Indonesia.
- FAO. 2010. *Guidelines for Measuring Household and Individual Dietary Diversity*. FAO. <https://doi.org/613.2KEN>.
- Glew, L., M.B. Mascia, & F. Pakiding. (2012). “Solving the Mystery of MPA Performance: Monitoring Social Impacts. Field Manual (Version 1.0).” Washington D.C. and Manokwari, Indonesia.
- Goungetas, B.P., H.H. Jensen, & S.R. Johnson. (1993). “Food Demand Projections Using Full Demand Systems.” *Food Policy* 18

- (1): 55–63. [https://doi.org/10.1016/0306-9192\(93\)90096-T](https://doi.org/10.1016/0306-9192(93)90096-T).
- Hardinsyah. (2007). “Review Faktor Determinan Keanekaragaman Konsumsi Pangan.” *Jurnal Gizi Dan Pangan* 2 (2): 55–74. <https://doi.org/10.25182/jgp.2007.2.2.55-74>.
- Hickman, B.W., G.E. Gates, & R.P. Dowdy. (1993). “Nutrition Claims in Advertising: A Study of Four Women’s Magazines.” *Journal of Nutrition Education* 25 (5): 227–35. [https://doi.org/10.1016/S0022-3182\(12\)81000-4](https://doi.org/10.1016/S0022-3182(12)81000-4).
- Huffman, S.L. (1987). “Women’s Activities and Impacts on Child Nutrition”, in Gittinger J. P., Leslie J., Hoisington C., Eds, Food Policy: Integrating Supply, Distribution and Consumption.” *The Johns Hopkins University Press, Baltimore*, 371–84.
- Iwao, S. (1993). *The Japanese Woman: Traditional Image and Changing Reality*. New York: The Free Press, a Division of Macmillan Inc.
- Jones, A. D., Francis M. N, Gretel P., & S. L. Young. (2013). “What Are We Assessing When We Measure Food Security? A Compendium and Review of Current Metrics.” *Advances in Nutrition* 4 (5): 481–505. <https://doi.org/10.3945/an.113.004119>.
- Kartikasari, S.N., A.J. Marshall, & B.M. (eds) Beehler. (2012). *Seri Ekologi Indonesia Jilid VI: Ekologi Papua*. Edited by S.N Kartikasari, A.J. Marshall, and B.M Beehler. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor dan Conservation International.
- Leroy, J. L., Marie R., Edward A. F., Jody H. & Terri J. Ballard. (2015). “Measuring the Food Access Dimension of Food Security.” *Food and Nutrition Bulletin* 36 (2): 167–95. <https://doi.org/10.1177/0379572115587274>.
- Madanijah, S. (2004). *Pola Konsumsi Pangan. Di Dalam: Pengantar Pangan Dan Gizi* . Edited by Y.F. Balawati, A. Khomsan, and C.M. Dwiriani. Jakarta: Penebar Swadaya.
- Mangubhai, S., Erdmann, M. V., Wilson, J. R, Huffard, C. L., Ferdiel B., Hidayat, N. I., & C. Hitipeuw. (2012). “Papuan Bird’s Head Seascape: Emerging Threats and Challenges in the Global Center of Marine Biodiversity.” *Marine Pollution Bulletin* 64 (11): 2279–95. <https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2012.07.024>.
- Maxwell, S., & T. R. Frankenberger. (1992). *Household Food Security: Concepts, Indicators, Measurements: A Technical Review*.
- National Board for Family Planning (BKKBN) and Community System Foundation. (1986). *KB-Gizi – An Indonesian Integrated Family Planning, Nutrition and Health Program: The Evaluation of the First Five Years of Program Implementation in East Java and Bali*. Michigan: Ann Arbor, MI (USA) Community Systems Foundation.
- Onis, M. de, & M. Blössner. (2003). “The World Health Organization Global Database on Child Growth and Malnutrition: Methodology and Applications.” *International Journal of Epidemiology* 32 (4): 518–26. <https://doi.org/10.1093/ije/dyq099>.
- Pakiding, F, D Matualage, K Salosso, Purwanto, I.R Anggriyani, A Ahmad, & D.A Brown. (2020). “Laporan Status Jejaring Kawasan Konservasi Perairan Di Bentang Laut Kepala Burung Papua.” Manokwari,

- Indonesia, Jakarta, Indonesia, dan Washington-DC, United States.
- Peng, W., & E.M. Berry. (2019). "The Concept of Food Security." In *Encyclopedia of Food Security and Sustainability*, edited by P. Ferranti, E.M. Berry, and J.R. Anderson, 2:1–7. Elsevier.
<https://doi.org/10.1016/B978-0-08-100596-5.22314-7>.
- Raunikar, R., and C-L. Huang. (1987). "Food Demand Analysis: Problems, Issues, and Empirical Evidence." *Ames: Iowa State University Press*.
- Shah, C. H. (1983). "Food Preference, Poverty, and the Nutrition Gap." *Economic Development and Cultural Change* 32 (1): 121–48. <https://doi.org/10.1086/451374>.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.
- Swindale, A., & P. Bilinsky. (2006). "Development of a Universally Applicable Household Food Insecurity Measurement Tool: Process, Current Status, and Outstanding Issues." *The Journal of Nutrition* 136 (5): S1449–52.
<https://doi.org/10.1093/jn/136.5.1449S>.
- Wallace, C. C., Emre T., & L. DeVantier. (2011). "Novel Characters in a Conservative Coral Genus: Three New Species of *Astreopora* (Scleractinia: Acroporidae) from West Papua." *Journal of Natural History* 45 (31–32): 1905–24.
<https://doi.org/10.1080/00222933.2011.573098>.
- Webb, P., Coates, J., Frongillo, E. A., Rogers, B. L., Swindale, A., & P. Bilinsky. (2006). "Measuring Household Food Insecurity: Why It's So Important and Yet So Difficult to Do," *The Journal of Nutrition* 136 (5): S1404–8.
<https://doi.org/10.1093/jn/136.5.1404S>.